

Ekologi Manusia

Editor : Soeryo Adiwibowo



Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor

EKOLOGI MANUSIA

Editor: Soeryo Adiwibowo

EKOLOGI MANUSIA
Editor: Soeryo Adiwibowo

© Fakultas Ekologi Manusia - FT. Bina
Karya ini diterbitkan dengan izin
Penerbitan pertama kali oleh
Fakultas Ekologi Manusia - FTB
Agustus 2007

ISBN 978-979-1578-60-8

Ekologi Manusia

Editor: Soeryo Adiwibowo

Editor Bahasa : Rina Mardiana
Penata Letak : Mahmudi Siwi
Desain Cover : Wahono

© Fakultas Ekologi Manusia – IPB, Bogor
Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Fakultas Ekologi Manusia – IPB
Agustus 2007

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit

ISBN: 978-979-1578-60-8

PENGANTAR REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Memasuki abad ke-21 IPB berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan status BHMN, IPB diberi otonomi dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki agar lebih cepat dan optimal mewujudkan IPB menjadi pendidikan tinggi dengan ciri *academic excellence* dan *entrepreneurial excellence*.

Salah satu upaya yang dilakukan IPB dalam pengelolaan sumberdaya adalah penataan dan pengembangan kelembagaan akademik di IPB. Alhamdulillah, berbagai penataan dan pengembangan kelembagaan akademik telah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan sejarah dan arah pengembangan IPB, pengembangan ilmu, kebutuhan masyarakat, prinsip efisiensi, dan moto IPB “mencari dan memberi yang terbaik”.

Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB lahir dari proses penataan kelembagaan akademik tersebut. Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dikembangkan menjadi padu yaitu Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM). Pusat-pusat direkayasa ulang sehingga menjadi 13 pusat dibawah koordinasi LPPM. Departemen ditata ulang dengan mandat pengembangan ilmu yang lebih jelas dan fokus dan melaksanakan sistem pendidikan major-minor, sehingga menghasilkan 36 Departemen yang dikelola dalam 9 Fakultas, termasuk fakultas terbaru yaitu Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) pada tanggal 2 Agustus 2005.

FEMA IPB sebagai Fakultas Ekologi Manusia yang pertama di Indonesia, perlu memiliki konsep yang didokumentasikan dengan baik agar dapat memberikan pencerahan tentang pengertian dan aplikasi ekologi manusia, pengembangan ilmu dan pendidikan tinggi ekologi manusia, dan menjawab bagaimana dan mengapa

Fakultas Ekologi Manusia lahir di IPB. Sejalan dengan hal ini, kami menyambut baik kehadiran buku Ekologi Manusia, yang ditulis oleh staf FEMA IPB.

Semoga buku pertama ekologi manusia dalam bahasa Indonesia ini dapat memberi pencerahan bagi pembaca tentang ekologi manusia, bahkan menjadi bacaan wajib bagi setiap mahasiswa baru di Fakultas Ekologi Manusia. Juga kami berharap buku ini dapat memberi inspirasi bagi akademisi yang berminat mengembangkan ilmu dan pendidikan tinggi ekologi manusia di Tanah Air; dan memperkaya wawasan bagi pembuat kebijakan, perencana, teknokrat dan pelaksana program dalam manajeri program-program pembangunan secara holistik dan berkelanjutan.

Bogor, Agustus 2007

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc

PENGANTAR DEKAN FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA IPB

Pembentukan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 2 Agustus 2005 menjadi tonggak sejarah pengembangan inovasi dan pendidikan tinggi Ekologi Manusia di Indonesia. Sebelumnya ekologi manusia diajarkan dalam bentuk topik pengajaran, dan mata kuliah di IPB dan beberapa pendidikan tinggi di Tanah Air. Sebagai Fakultas Ekologi Manusia yang pertama di Indonesia dan ketiga di Asia Tenggara, FEMA diharapkan menjadi *trend setter* dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan penerapan inovasi Ekologi Manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan di Indonesia.

Berbagai pertanyaan muncul saat menjelang dan setelah kelahiran FEMA IPB. Pertanyaan itu antara lain apa itu Ekologi Manusia? Apakah ekologi manusia sebagai pendekatan atau sebagai ilmu?. Bagaimana aplikasinya sebagai pendekatan dan ilmu dalam mewujudkan kesejahteraan manusia? Sejak kapan Ekologi Manusia lahir dan bagaimana perkembangannya? Apakah relevan Ekologi Manusia dibentuk di IPB? Berbagai pertanyaan tersebut menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang dahsyat bagi kami mengajak staf FEMA menulis buku akademik Ekologi Manusia, dengan harapan berbagai pertanyaan tersebut dijawab dengan baik secara akademik.

Alhamdulillah, buku "Ekologi Manusia" ini dapat diwujudkan, yang bermula dari komitmen kami sebagai calon Dekan Fakultas Ekologi Manusia pada pemaparan pemikiran calon dekan dengan judul Membangun Fakultas Ekologi Manusia pada Rapat Senat FEMA IPB tanggal 30 November 2005. Ide ini terus bergulir setelah mendapat amanah menjadi Dekan Fakultas Ekologi Manusia. Keyakinan dan tekad untuk mewujudkan buku ini semakin bulat pada awal Januari 2006, setelah memperoleh masukan dan persetujuan Senat FEMA tentang garis besar isi buku dan rencana terbit pada Dies ke-1 FEMA. Juga diperkuat dengan kesediaan Dr. Soeryo Adiwibowo menjadi editor.

Buku ini tidak mungkin terwujud tanpa restu-Nya dan peran banyak pihak. Rasa hormat dan terimakasih yang dalam kami sampaikan kepada semua penulis yang memang pakar dibidangnya atas curahan waktu, pemikiran dan kerja kerasnya disela-sela kesibukan akademik. Rasa hormat dan terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap anggota Senat FEMA terutama Ketua Senat FEMA - Prof. Dr. Hidayat Syarif, MS atas segala masukan dan dukungannya. Juga kepada editor - Prof. Dr. H. Hardinsyah Adiwibowo; dan rekan kami Dr. Arya Dharmawan, Dr. Euis Sunarti, Dr. Tadjuddin Alim dan Dr. Diah Krisnatuti yang telah memberikan masukan bermakna dalam terwujudnya buku ini. Perkenankan juga kami menyampaikan terimakasih atas sentuhan jari jemari Mahmudi Siwi, SP dan Rina Mardiana, SP. MSi pada *keyboard* mendampingi editor.

Buku ini diharapkan menjadi bacaan bagi segenap insan akademik di FEMA, termasuk mahasiswa, bahkan bagi calon mahasiswa yang tertarik pada *Ecology of Man* Manusia. Akan sulit bagi calon mahasiswa untuk menentukan mau kemana bila tidak memahami apa dan bagaimana Ekologi Manusia. Buku ini juga kami harapkan menjadi pengayaan bacaan bagi pendidik, peneliti, teknokrat dan pemimpin yang tertarik pada Ekologi Manusia baik sebagai ilmu maupun pendekatan dalam mewujudkan program, kebijakan dan hari depan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Penulisan buku ini juga merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan komitmen dan tanggung jawab moral kami, dalam upaya mengaplikasikan perspektif ekologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dimasa kini maupun dimasa datang. Semoga segenap substansi yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sesuai dengan harapan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap niat baik hamba-Nya.

Bogor, Agustus 2007

Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor IPB (iii)

Pengantar Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB (v)

Ekologi Manusia: Mata Air Integrasi Ilmu Alam dan Ilmu Sosial (vii)

Soeryo Adiwibowo

Daftar Isi (xxiii)

Bagian I – Fondasi, Teori dan Diskursus Ekologi Manusia

Paradigma, Perspektif dan Etika Ekologi (1)

Soeryo Adiwibowo

Antropologi Budaya, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik (17)

Arya Hadi Dharmawan

Antropologi Ekologi (43)

Saharuddin

Sosiologi Lingkungan (71)

Titik Sumarti

Ekologi Politik (87)

Arif Satria

Ekologi Keluarga (101)

Euis Sunarti

Gizi, Pangan dan Sistem Ekologi Manusia (117)

Hardinsyah

Bagian II – Pembangunan Pertanian Berbasis Ekologi

Pertanian Berkelanjutan (127)

Satyawan Sunito

Moda Produksi Multi Suku dalam Pengelolaan Sumber-sumber Agraria (143)

Endriatmo Soetarto

Paradigma Ekologi Budaya untuk Pengembangan Pertanian Padi (161)

MT. Felix Sitorus

Ekologi Politik Kapas Transgenik (179)

Rina Mardiana

Bagian III – Ekofeminisme, Gender dan Konsumen Hijau

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (209)

Siti Sugiah M. Mugniesyah

Ekofeminisme (233)

Melani Abdulkadir-Sunito dan Ekawati Sri Wahyuni

Gender dan Keluarga (247)

Herien Puspitawati dan Diah Krisnatuti

Gerakan Konsumen Hijau (277)

Ujang Sumarwan dan MD. Djamaluddin

Bagian IV – Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi

Komunikasi dalam Perspektif Ekologi Manusia (289)

Sumardjo

Komunikasi menuju Komunitas Pembelajaran (317)

Djuara Lubis

Lingkungan Hidup, Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (327)

Hardinsyah, Saharuddin dan Titik Sumarti

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi dan Keadilan Sosial (337)

Bredian Tonny Nasdian

Bagian V – Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Penduduk, Organisasi, Lingkungan dan Teknologi (355)

Said Rusli dan Ekawati Sri Wahyuni

Manajemen Kesehatan dan Lingkungan (369)

Clara M. Kusharto dan Suprihatin Guhardja

Bagian VI - Pendidikan Tinggi Ekologi Manusia

Pengembangan Ilmu dan Pendidikan Tinggi Ekologi Manusia (385)
Hardinsyah, Hidayat Syarief dan Sediono M.P. Tjondronegoro

Pendidikan Tinggi Ekologi Manusia di IPB (407)
Budi Setiawan, Evy Damayanthi, Hartoyo, Gunardi, Lala M. Kolopaking dan Suprihatin Guhardja

Mata Kuliah Ekologi Manusia di S-1IPB (437)
Jalal dan Rina Mardiana

Riwayat Hidup Singkat Penulis

GENDER, LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Siti Sugiah M. Mugniesyah

PENDAHULUAN

Berkembangnya wacana hubungan antara kemiskinan dengan menurunnya kualitas sumberdaya dan degradasi ekosistem merupakan tantangan besar bagi kebijakan dan paktek pembangunan dewasa ini. Umum diketahui bahwa di banyak negara di berbagai belahan dunia, terlebih di negara sedang berkembang termasuk Indonesia, sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupan banyak penduduk menunjukkan kerusakan yang sangat nyata. Tekanan komersialisasi seringkali mempengaruhi tata guna lahan yang merugikan kepentingan rumahtangga miskin, terlebih di pedesaan. Kemiskinan telah menjadikan keluarga-keluarga petani menggunakan lahan produktif yang marjinal dan rentan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup.

Kondisi tersebut mencerminkan penyelenggaraan pembangunan, khususnya di negara sedang berkembang yang berbasis pertanian, tidak mampu mewujudkan tujuannya dalam menciptakan kesejahteraan keluarga petani. Reintjes dkk (1992); Chambers (1993) dan Uphoff (1993) mengemukakan beberapa kelemahan paradigma pembangunan pertanian pada masa lalu, yang dikenal sebagai modernisasi pertanian (Revolusi Hijau), bahwa modernisasi pembangunan pertanian yang didukung oleh penelitian dan penyuluhan pertanian lebih menekankan pada komoditi tunggal (monokultur), khususnya tanaman pangan padi; mengabaikan sumberdaya lahan kering atau ekosistem lokal; mengabaikan pengetahuan dan teknologi petani/nelayan lokal; menekankan penelitian yang berbasis pada pusat-pusat penelitian bukan pada usaha petani; tidak berorientasi pada sumberdaya manusia; bias gender; serta mengabaikan kelembagaan-kelembagaan lokal.

Dalam hal ini, gender merupakan konsep yang sangat berguna untuk menganalisis sistem produksi pedesaan sebagai suatu keseluruhan guna memahami sejauh mana laki-laki dan perempuan berbagi peranan dan tanggung jawab. Karenanya, kita perlu

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

memahami cara-cara melalui mana perubahan lingkungan dan struktur masyarakat mempengaruhi laki-laki dan perempuan dari beragam kategori sosial. Sejalan dengan itu, kita juga akan memahami secara lebih baik kontribusi keduanya terhadap ekosistem sekaligus memahami respon masyarakat pedesaan terhadap degradasi yang bersifat ekologis.

Mengonseptualisasikan gender juga penting dalam upaya mendisagregasi dan menginterpretasikan informasi tentang fungsi rumahtangga dan organisasi-organisasi pada suatu komunitas dalam pengelolaan sumberdaya alam. Penggunaan perspektif gender memperjelas batasan-batasan yang tidak pasti dari rumahtangga dan keluarga serta cara-cara yang kompleks melalui mana keluarga, rumahtangga, komunitas dan ekosistem berhubungan.

Dengan mengacu kepada pendapat para ahli yang menekuni hubungan antara gender, lingkungan dan pembangunan, kita perlu meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki beragam tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya lokal pada tingkat komunitas. Oleh karenanya terdapat kebutuhan untuk menggali lebih mendalam hubungan-hubungan antara gender, lingkungan dan pembangunan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang gender sebagai variabel kunci yang mempengaruhi proses-proses sosial, ekonomi dan ekologis, khususnya pada masyarakat pedesaan; untuk menunjukkan bahwa perhatian pada aspek gender dapat meningkatkan keadilan dan keefektifan program-program pengelolaan sumberdaya. Sehubungan dengan itu, tulisan ini memuat beberapa hal penting berkenaan dengan isu-isu gender, lingkungan dan pembangunan; khususnya berkenaan dengan pengertian konsep, peranan dan relasi gender, gender dalam rumahtangga petani dalam pengelolaan lingkungan, gender dalam kelembagaan lokal dan hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, gender dengan pembangunan berkelanjutan, serta beragam perspektif dalam poros gender, lingkungan dan pembangunan.

PENGERTIAN DAN PERANAN GENDER

Gender Bukan Jenis Kelamin dan Bukan Perempuan

Sampai kini masih banyak para akademisi dan praktisi pembangunan yang menggunakan istilah seks (jenis kelamin) dan gender secara tertukar atau dianggap sama. Untuk kejelasan, kita perlu membedakan makna keduanya, karena memang makna kedua istilah itu berbeda. Para ahli sependapat bahwa istilah seks (jenis kelamin) adalah penandaan berdasar biologis, karenanya diklasifikasikan berdasar karakteristik biologis. Masyarakat kita menggunakan kualitas biologis dan genetik untuk menentukan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Penandaan tersebut biasanya didasarkan pada genital eksternal dan organ-organ seks internal.

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana dikemukakan oleh Wood (2001) jenis kelamin itu sendiri ditentukan oleh kromosom yang memprogram bagaimana suatu janin berkembang. Dari 23 pasangan kromosom yang menentukan perkembangan manusia, hanya satu pasangan yang menentukan jenis kelamin. Pasangan tersebut selalu terdiri dari X, yang bisa memiliki atau tidak memiliki kromosom Y. Kromosom XX biasanya menghasilkan jenis kelamin perempuan, dan kromosom XY biasanya menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Dalam membicarakan seks (jenis kelamin) kita menggunakan kata-kata "biasanya", karena senantiasa ditemukan adanya kekecualian. Kebanyakan laki-laki memiliki struktur kromosom XY, karena mereka mewarisi kromosom X dari ibu mereka dan kromosom Y dari ayah mereka. Adapun kebanyakan perempuan mempunyai struktur kromosom XX karena mereka mewarisi kromosom X dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, hanya perempuan yang mewarisi kromosom X dari kedua orangtuanya, sementara laki-laki hanya mewarisi kromosom X dari ibunya.

Menurut Arliss (1991), beberapa peneliti genetik menghubungkan antara komposisi kromosom laki-laki dan perempuan dengan indikasi kekuatan fisik, yang secara stereotipe dihubungkan dengan laki-laki. Anggapan umum adalah bahwa laki-laki secara alamiah lebih kuat daripada perempuan, oleh karenanya mereka lebih rasional dan kompetitif. Namun demikian, menurutnya terdapat bukti-bukti bahwa secara statistik janin perempuan lebih sehat dan mampu bertahan hidup dibandingkan janin laki-laki. Secara khusus dilaporkan bahwa (1) banyak janin laki-laki yang secara spontan gugur daripada janin perempuan; (2) tingkat mortalitas janin laki-laki lebih tinggi; (3) sejumlah abnormalitas genetik, seperti hemofilia dan buta warna lebih banyak dijumpai pada laki-laki; (4) perempuan tampak lebih resisten terhadap pengaruh malnutrisi dan bentuk-bentuk penderitaan lainnya; dan (5) bahkan umur harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan dalam hal bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, khususnya dihubungkan dengan pengaruh dari perilaku relasi gender. Diantaranya, karena adanya anggapan bahwa "laki-laki lebih menderita stress karena selalu di bawah tekanan pekerjaan yang tinggi" atau "sudah tentu perempuan berumur panjang karena mereka tidak berperang".

Meskipun faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan gender bisa mempengaruhi kondisi tersebut, namun faktanya, para peneliti menyimpulkan bahwa kromosom X lebih banyak mengandung informasi genetik daripada kromosom Y (Arliss 1994). Pada tahun 1996 dilaporkan bukti-bukti bahwa beberapa gen yang mengontrol intelegensia terletak hanya pada kromosom X (Tanouye *dalam* Wood 2001). Temuan tersebut berimplikasi pada anggapan bahwa intelegensia yang dimiliki laki-laki itu diwarisi dari ibunya, sementara pada perempuan bisa mewarisi dari masing-masing atau kedua orangtuanya. Penelitian-penelitian genetik juga telah melaporkan bahwa gen yang bertanggungjawab untuk keterampilan sosial hanya aktif pada kromosom X yang ada pada laki-laki (Langreth *dalam* Wood 2001). Hal ini bisa menjelaskan mengapa perempuan secara umum lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dibanding laki-laki manakala berinteraksi dalam situasi-situasi

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

sosial. Dengan demikian, berdasarkan perbedaan kromosom laki-laki dan perempuan tersebut, sulit dipercaya bahwa laki-laki secara bawaan (genetik) lebih kuat dan agresif daripada perempuan yang dianggap terlahir lebih lemah dan lebih pasif. Meminjam istilah Montagu, Arliss menyatakan bahwa sebenarnya secara genetik, perempuan itu memiliki superioritas yang alamiah.

Konsep gender - dibaca jender - dalam Kamus Oxford diartikan sebagai fakta menjadi laki-laki dan perempuan serta isu-isu yang berhubungan dengan perbedaan relasi dan peranan gender. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita menemukan kata gender dengan makna bunyi-bunyian, bagian dari gamelan. Dengan demikian, konsep gender dalam tulisan ini tidak mengacu pada pengertian yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Sebagai sebuah istilah atau konsep, gender berasal dari Barat, namun sebagai suatu fakta sosial, gender merupakan fenomena yang ditemukan pada hampir semua masyarakat di dunia.

Menurut Wood (2001), Mary Wollstonecraft diakui sebagai orang pertama (1792) yang menyatakan gender sebagai suatu karakteristik sosial. Berbeda dari konsep seks atau jenis kelamin, gender diperoleh individu melalui proses interaksi dalam dunia sosial. Banyak ahli mengemukakan bahwa gender itu dikonstruksikan, karena gender bukanlah suatu fakta alamiah, akan tetapi mengambil bentuk kongkrit yang secara historis mengubah hubungan sosial.

Beberapa definisi gender yang dikemukakan oleh lembaga, ahli atau peminat studi perempuan/gender adalah berikut ini:

1. Gender adalah perbedaan-perbedaan (dikotomi) sifat perempuan dan laki-laki yang tidak hanya berdasarkan biologis semata tetapi lebih pada hubungan-hubungan sosial-budaya antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya yang lebih luas, masyarakat dan bernegara (Donnel 1988; Eviota 1993).
2. Gender adalah suatu proses melalui mana individu-individu yang dilahirkan dalam kategori jenis kelamin laki-laki dan perempuan dirubah menjadi kategori sosial laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh sifat-sifat maskulin dan feminin (Kabeer 1990 *dalam* INSTRAW 1995).
3. Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (Fakih 1994).
4. Gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang dipelajari, bervariasi secara luas diantara masyarakat dan budaya dan berubah sejalan dengan perkembangan waktu/zaman (ILO 2000).
5. Gender adalah suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena femininitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kitalah yang menjadikan mereka berbeda (Wood 2001).
6. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peranan, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Kantor Meneg PP 2001).

Mengacu pada definisi di atas, kebudayaan yang didalamnya mencakup adat, aturan, dan harapan untuk berperilaku, menjadi sumber kekuasaan yang mempengaruhi persepsi tentang gender. Ini berarti gender bukan jenis kelamin. Gender juga bukan perempuan. Gender dikonstruksikan secara sosial-budaya. Dengan demikian, gender itu dibentuk, sementara seks itu diberikan (*gender must be enacted, while sex is assigned*).

Mengapa Gender Dipermasalahkan?

Perbedaan jenis kelamin telah mempengaruhi manusia untuk memberi persepsi identitas peranan gender atau mengakibatkan perbedaan peranan gender. Dikaitkan dengan sifatnya, kita mengenal istilah feminin vs maskulin, sementara dikaitkan dengan perilaku masing-masing dalam konteks peranannya dalam keluarga dan masyarakat, membedakan peranan gender sedemikian rupa, yakni laki-laki sebagai pencari nafkah, pemimpin keluarga dan masyarakat. Sementara itu, perempuan sebagai ibu rumah tangga menjalankan peranan reproduktif serta peranan lain yang berhubungan dengan peran reproduksinya, yang kita kenal dengan peranan domestik. Perbedaan gender tersebut sepanjang sejarah menimbulkan adanya permasalahan yakni memunculkan ketidakadilan gender, yang menurut Fakih bisa mencakup stereotipe, beban kerja, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan.

Permasalahannya, sebagian besar diantara kita pada masa lalu dan mungkin juga masih berlanjut hingga kini, yang menjadikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu pembenaran diskriminasi terhadap perempuan. Kapasitas biologis perempuan dalam mengasuh dan memelihara anak digunakan sebagai rasional terhadap penentuan peranan bahwa perempuan hanya boleh berperan dalam kegiatan domestik sekaligus menentukan apa yang seharusnya dan pantas mereka lakukan di dalam dan atau di luar keluarga. Lebih lanjut, adanya stereotipe peranan laki-laki dan perempuan - pencari nafkah vs pekerja keluarga/ibu rumah tangga - menyebabkan adanya beban kerja yang meningkat pada perempuan, karena realitanya perempuan dapat melakukan ketiga peranan gender secara bersamaan, sementara laki-laki terbebas dari peranan reproduktif yang sangat menyita waktu itu. Stereotipe peran laki-laki di sektor publik menempatkannya untuk akses pada kekuasaan (sebagai pemimpin/pengambil keputusan/penentu kebijakan) sementara perempuan menjadi subordinatnya atau dikenal sebagai tersubordinasi.

Dengan demikian, proses konstruksi gender yang ada di dunia, kini bukanlah suatu proses yang sederhana sebagai suatu "proses diferensiasi gender" yang menghasilkan dua peranan gender antara laki-laki dan perempuan yang "terpisah tapi seimbang", akan tetapi juga merupakan suatu proses mensubordinasikan perempuan, baik yang terjadi dalam keluarga, masyarakat (termasuk dalam kelembagaan pendidikan) maupun negara.

Stereotipe ini menjadikan birokrat dan teknokrat atau penentu kebijakan dan pengambil keputusan dalam perencanaan program pendidikan cenderung tidak memperhitungkan perempuan sebagai sumberdaya manusia yang produktif, sehingga haknya untuk akses kepada sumberdaya diabaikan/terabaikan. Adanya stereotipe peran gender dan subordinasi perempuan, menjadikan perempuan termarginalisasi dalam proses pembangunan, terpinggirkan/tersingkirkan, domestikasi dan lainnya. Perempuan petani kurang atau hampir tidak memiliki akses dalam arus utama penyuluhan pertanian. Hal ini berkebalikan dengan laki-laki, dikarenakan pandangan penyuluh yang menganggap bahwa petani adalah laki-laki.

Selanjutnya, secara bersamaan, stereotipe peran gender dan subordinasi serta beban kerja yang tinggi pada perempuan akan berdampak pada tindak kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga/rumah tangga maupun dalam masyarakat, lembaga/organisasi bahkan negara.

Peranan dan Relasi Gender

Peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peranan gender adalah perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki. Moser (1993) mengemukakan adanya tiga kategori peranan gender (*triple roles*), yaitu:

- 1) Peranan produktif, yakni peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran/upah secara tunai atau sejenisnya. Termasuk produksi pasar dengan suatu nilai tukar, dan produksi rumah tangga/subsistem dengan suatu nilai guna, tetapi juga suatu nilai tukar potensial. Contohnya, kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal.
- 2) Peranan reproduktif, yakni peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Misalnya, melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan rumah, memperbaiki baju, dan lainnya.
- 3) Peranan pengelolaan masyarakat dan politik. Peranan ini dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut:
 - a. Peranan pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial), yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif, bersifat ~~dan~~ tanpa upah.
 - b. Pengelolaan masyarakat politik (kegiatan politik), yakni peranan yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik, biasanya dibayar (langsung atau tidak langsung), dan meningkatkan kekuasaan atau status.

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Peranan yang dilakukan berhubungan dengan apa yang disebut Agarwal (1994) sebagai relasi gender, yang diartikan sebagai suatu hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (*ide*), praktek dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan dan alokasi sumberdaya antara laki-laki dan perempuan. Peranan dan relasi gender itu dinamis. Perubahan peranan gender sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan situasi ekonomi, sumberdaya alam, dan atau politik termasuk perubahan berupa usaha-usaha pembangunan atau penyesuaian program struktural atau oleh kekuatan-kekuatan di tingkat nasional dan global. Namun demikian tidak semua perubahan peranan bermakna perubahan dalam relasi gendernya. Itu sebabnya, banyak ahli gender dan pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun keadilan gender (*gender equity*) diartikan sebagai keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-kebutuhan mereka, mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan manfaat. Adapun kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotipe, prasangka dan peranan gender yang kaku. Dinyatakan lebih lanjut bahwa perbedaan perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan, dinilai, dan didukung secara setara bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan menjadi sama, akan tetapi hak-hak, tanggung jawab dan kesempatan mereka tidak ditentukan karena mereka terlahir sebagai laki-laki dan perempuan (ILO 2001).

RELASI GENDER PADA RUMAHTANGGA PETANI

Kita mengetahui bahwa setiap individu merupakan bagian dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni rumah tangga atau keluarga. Sampai saat ini masih didapati banyak akademisi dan praktisi pembangunan pertanian yang bias gender dalam memandang rumahtangga petani. Mereka memandang bahwa dalam rumah tangga petani, dipastikan laki-lakilah yang menjadi pemimpin keluarga. Secara statistik perempuan dianggap menjadi kepala keluarga hanya jika berstatus janda. Selain itu, laki-laki senantiasa dianggap sebagai pemilik dan/atau penguasa sumberdaya rumahtangga, karenanya hanya suami yang bertanggungjawab dalam kegiatan produktif; sementara perempuan dianggap hanya sebagai pekerja keluarga tanpa upah dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan reproduktif.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga petani merupakan entitas yang kompleks yang terdiri atas laki-laki dan perempuan beragam generasi, baik itu suami (ayah) dan isteri (ibu) beserta anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka serta lainnya. Kita juga menjumpai bahwa akses dan kontrol perempuan juga

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dimana rumah tangga/keluarga menjadi anggotanya, karenanya dimungkinkan adanya perempuan yang akses dan kontrol terhadap sumberdaya, termasuk lingkungan.

Pada banyak komunitas di pedesaan, pengelolaan usahatani sebagai bagian dari ekosistem menjadi tanggung jawab bersama anggota rumah tangga petani. Banyak studi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga petani bertanggung jawab dalam pengelolaan usahatani mereka yang bersifat subsisten (Boserup 1970). Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa perempuan pada rumah tangga di pedesaan berperan sentral dalam manajemen dan penggunaan sumberdaya alam pada tingkat lokal, setidaknya berkenaan air bersih, lahan, energi, pemukiman dan rumah serta kesehatan yang kesemuanya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (Dankelman 2001).

Berkean sumberdaya air, perempuan di banyak negara-negara sedang berkembang bertanggung jawab dalam penyediaan bagi keutuhan rumah tangga dan kegiatan produktif seperti hewan ternak, usahatani dan pengolahan pangan. Perempuan bertanggung jawab dalam mengumpulkan air, mengangkut dan menyimpannya serta menentukan bagaimana sumberdaya air harus dialokasikan sesuai peruntukannya. Perempuan mengeluarkan banyak energi untuk melakukan hal tersebut. Karena begitu banyaknya peranan yang harus dilakukannya - seperti mencuci perabotan rumah, pakaian dan membersihkan rumah serta pekarangan - perempuan juga mengembangkan strategi penggunaan air seefisien mungkin. Semua peranan ini dilaksanakan tanpa atau hanya sedikit bantuan dari suaminya atau anak lelakinya yang dewasa, kecuali anak perempuan.

Dalam hubungannya dengan sumberdaya lahan, FAO melaporkan bahwa perempuan bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen dalam produksi pangan dunia. Selain itu, meningkatnya migrasi laki-laki ke kota serta lebih terlibatnya laki-laki dalam tanaman ekspor meningkatkan tanggung jawab perempuan untuk menghasilkan pangan bagi konsumsi rumah tangga. Banyak studi membuktikan bahwa perempuan bertanggung jawab pada sebagian besar kegiatan memproduksi, menyimpan, mengolah, dan memasarkan pangan serta mempersiapkan dan memasak makanan bagi konsumsi rumah tangga (FAO 2003).

Karenanya, banyak ahli, termasuk Quisumbing menyatakan bahwa perempuan berperan sentral dalam tiga pilar ketahanan pangan keluarga, yakni ketersediaan pangan, akses pangan dan penggunaan pangan. Demikian pula halnya perempuan pada komunitas nelayan, selain dalam kegiatan persiapan dan penyediaan pangan, mereka juga mempunyai peran dalam mengolah dan memasarkan ikan hasil tangkapan (Sajogyo et al 1990). Perempuan sebagaimana laki-laki juga berperan dalam penangkapan ikan sebagaimana dilaporkan Diamond dkk (1998) dalam studinya di Sulawesi Utara. Masih dalam interaksinya dengan sumberdaya lahan, perempuan juga bertanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan keragaman hayati serta sumberdaya genetik tanaman yang penting bagi ketahanan

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dimana rumah tangga/keluarga menjadi anggotanya, karenanya dimungkinkan adanya perempuan yang akses dan kontrol terhadap sumberdaya, termasuk lingkungan.

Pada banyak komunitas di pedesaan, pengelolaan usahatani sebagai bagian dari ekosistem menjadi tanggung jawab bersama anggota rumah tangga petani. Banyak studi menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga petani bertanggung jawab dalam pengelolaan usahatani mereka yang bersifat subsisten (Boserup 1970). Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa perempuan pada rumahtangga di pedesaan berperan sentral dalam manajemen dan penggunaan sumberdaya alam pada tingkat lokal, setidaknya berkenaan air bersih, lahan, energi, pemukiman dan rumah serta kesehatan yang kesemuanya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (Dankelman 2001).

Berkenaan sumberdaya air, perempuan di banyak negara-negara sedang berkembang bertanggung jawab dalam penyediaan bagi keutuhan rumah tangga dan kegiatan produktif seperti hewan ternak, usahatani dan pengolahan pangan. Perempuan bertanggung jawab dalam mengumpulkan air, mengangkut dan menyimpannya serta menentukan bagaimana sumberdaya air harus dialokasikan sesuai peruntukannya. Perempuan mengeluarkan banyak energi untuk melakukan hal tersebut. Karena begitu banyaknya peranan yang harus dilakukannya - seperti mencuci perabotan rumah, pakaian dan membersihkan rumah serta pekarangan - perempuan juga mengembangkan strategi penggunaan air seefisien mungkin. Semua peranan ini dilaksanakan tanpa atau hanya sedikit bantuan dari suaminya atau anak lelakinya yang dewasa, kecuali anak perempuan.

Dalam hubungannya dengan sumberdaya lahan, FAO melaporkan bahwa perempuan bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen dalam produksi pangan dunia. Selain itu, meningkatnya migrasi laki-laki ke kota serta lebih terlibatnya laki-laki dalam tanaman ekspor meningkatkan tanggung jawab perempuan untuk menghasilkan pangan bagi konsumsi rumah tangga. Banyak studi membuktikan bahwa perempuan bertanggungjawab pada sebagian besar kegiatan memproduksi, menyimpan, mengolah, dan memasarkan pangan serta mempersiapkan dan memasak makanan bagi konsumsi rumah tangga (FAO 2003).

Karenanya, banyak ahli, termasuk Quisumbing menyatakan bahwa perempuan berperan sentral dalam tiga pilar ketahanan pangan keluarga, yakni ketersediaan pangan, akses pangan dan penggunaan pangan. Demikian pula halnya perempuan pada komunitas nelayan, selain dalam kegiatan persiapan dan penyediaan pangan, mereka juga mempunyai peran dalam mengolah dan memasarkan ikan hasil tangkapan (Sajogyo et al 1990). Perempuan sebagaimana laki-laki juga berperan dalam penangkapan ikan sebagaimana dilaporkan Diamond dkk (1998) dalam studinya di Sulawesi Utara. Masih dalam interaksinya dengan sumberdaya lahan, perempuan juga bertanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan keragaman hayati serta sumberdaya genetik tanaman yang penting bagi ketahanan

pangan (Karl 1996; Bunning and Hill 1996 dalam FAO 2003). Namun demikian, perempuan dan juga anak-anak menjadi pihak yang paling rawan jika ada penurunan produksi pertanian dan kekeringan.

Dalam konteks sumberdaya rumah dan pemukiman, Dankelman (1993; 1998) mengemukakan bahwa dikarenakan perempuan mencurahkan waktunya lebih lama dalam kegiatan di rumah ketimbang suaminya, mereka juga pihak yang lebih rentan menderita karena kondisi rumah dan pemukiman yang buruk. Perempuan dan anak-anak menjadi korban kondisi lingkungan yang buruk. Perempuan dan anak-anak merupakan 90 persen dari populasi pengungsi di banyak negara. Adapun peranannya dalam konteks energi, perempuan pedesaan adalah pelaku yang dominan dalam penyediaan kayu bakar bagi kebutuhan penyediaan pangan, bahkan tidak sedikit diantara mereka harus mengambilnya dari hutan yang jaraknya sangat jauh dari rumah.

RELASI GENDER DALAM KELEMBAGAAN LOKAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kenyataan menunjukkan bahwa pada tingkat komunitas terdapat beragam kelembagaan lokal yang mengatur perilaku individu dan keluarga/rumah tangga, dalam hal pengelolaan sumberdaya alam (lingkungan). Karenanya, kelembagaan mempunyai jalinan erat dengan peranan laki-laki dan perempuan dalam komunitas lokal tersebut. Sehubungan dengan itu, relasi gender dalam pembagian kerja serta hak-hak dan tanggung jawab, akan mempengaruhi pengelolaan ekosistem lokal yang dibutuhkan bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Uphoff (1986) yang menyatakan bahwa kelembagaan dan organisasi lokal merupakan aspek kritis dalam proses pembangunan, dan secara eksplisit memasukkan relasi gender dalam konteks pengambilan keputusan pembangunan pada tingkat kelembagaan lokal tersebut.

Dalam hal ini perhatian difokuskan pada bagaimana kelembagaan lokal berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam bekerja pada tingkat komunitas dan sejauh mana cara-cara kelembagaan bekerja tersebut dipengaruhi oleh peranan dan relasi gender yang ada dalam komunitas.

Sebagaimana diketahui, kita mengenal kelembagaan dan asosiasi/organisasi yang dimanfaatkan dalam proses pembangunan sebagai upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan pembangunan. Kita mengenal adanya kelembagaan informal di pedesaan. Thomas-Slyter dan Rocheleau (1995) mengemukakan bahwa kelembagaan informal pada komunitas bisa dibedakan ke dalam empat kategori. *Pertama*, jejaring patron-klien yang mengikat kewajiban timbal balik yang tidak setara dan akuntabilitas yang personal. Jejaring ini biasanya tidak egaliter, akan tetapi mengatur keuntungan secara timbal balik dimana pihak yang satu memberikan pelayanan jasa dan lainnya memberikan sumberdaya. *Kedua*, jejaring

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

hubungan keluarga dari suatu keluarga besar atau suku yang dapat beragam dalam hal ukuran dan kompleksitasnya. *Ketiga* adalah jejaring desa-kota, sebagian besar merupakan jejaring keluarga; tapi bisa juga tidak ada hubungan keluarga diantara mereka namun membangun suatu semangat *kindred* untuk memperoleh pekerjaan dan sejenisnya. Dan *keempat* adalah jejaring pertukaran sumberdaya dan tenaga kerja, yang bisa kecil, informal dan diorganisasikan secara *ad hoc* atau bisa juga merupakan kolektivitas yang terstruktur secara formal.

Sara Berry menelaah hubungan antara kelembagaan sosial, jejaring informal dan akses terhadap sumberdaya, dan mengemukakan bahwa kemampuan orang untuk melangsungkan kehidupan atau meningkatkan aset mereka tergantung kepada akses mereka terhadap sumberdaya produktif dan kemampuan mereka mengontrol dan menggunakan sumberdaya secara efektif. Akses terhadap sumberdaya itu sendiri sangat tergantung pada partisipasi mereka dalam beragam kelembagaan sosial, serta kekayaan dan transaksi pasar. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam jejaring memiliki kepentingan dan nilai tersendiri dalam hubungannya dengan akses terhadap sumberdaya (Thomas-Slayter dan Rocheleau 1995).

Kelembagaan informal pada banyak komunitas mengatur akses dan kontrol individu, keluarga dan kekerabatan dalam pengelolaan sumberdaya alam, seperti air, hutan, lahan, dan area penggembalaan. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan banyak ahli bahwa pembangunan selama ini telah meningkatkan privatisasi beragam sumberdaya yang selama ini diakses oleh masyarakat lokal (Boserup 1970; Agarwal 1993; Shiva 1989, Rocheleau et al 1990; Quisumbing 2001). Hal tersebut telah berdampak antara lain pada menurunnya akses dan kontrol perempuan terhadap lahan itu sendiri, kayu bakar dan hasil hutan lainnya. Sehingga jejaring dan asosiasi merupakan instrumen yang berharga yang memungkinkan rumahtangga untuk akses terhadap sumberdaya dan pertukaran produktif. Jejaring dan asosiasi tersebut menjadi unsur kunci bagi strategi individu dan rumahtangga untuk bertahan hidup, mengakumulasi dan memobilisasi sumberdaya. Selain itu, jejaring memungkinkan mereka bisa mengajukan masalah yang mereka hadapi secara *ad hoc*, sementara di pihak lain, asosiasi bisa menawarkan cara-cara untuk berurusan secara formal dengan sistem politik karena mereka memiliki struktur yang tegas, berkelanjutan dan keanggotaan yang visibel untuk mempengaruhi secara politis.

HUBUNGAN GENDER DALAM RUMAHTANGGA, LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Salah satu karakteristik dari pembangunan berkelanjutan selalu dihubungkan dengan dimensi ekologis dan sosial. Sehubungan dengan itu, Dankelman (2001) membangun sebuah model yang mengintegrasikan di dalamnya aspek lingkungan manusia (*human environment*) yang disebutnya sebagai *sociosphere*, dan sumberdaya alam (*natural resources*) yang disebutnya *ecosphere*. Pada dimensi *sociosphere*, dia membedakannya ke dalam tiga tingkatan, yaitu mikro, meso dan

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

makro, untuk menunjukkan bahwa proses-proses yang berlangsung pada setiap tingkatan tersebut bisa saja tidak sama namun satu sama lain saling berinteraksi dalam mempengaruhi proses pembangunan. Sedangkan pada aspek *ecosphere* terdapat keragaman hayati, flora dan fauna sebagai suatu agroekosistem. Lingkungan fisik - air, udara dan tanah - mempunyai suatu kuantitas dan kualitas yang akan melestarikan manusia dan kehidupannya. Komponen-komponen *ecosphere* berhubungan dan berinteraksi melalui siklus ekologis. Selanjutnya, *sociosphere* dan *ecosphere* ada di dalam suatu keseimbangan dinamis baik pada masing-masing lingkungan maupun dalam berinteraksi satu dengan lainnya.

Menurut Dankelman (2001), laki-laki maupun perempuan (termasuk anak-anak) memberikan kontribusi berupa energi, perspektif, waktu, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan teknologi budidaya untuk mengelola *ecosphere* dan menghasilkan produk darinya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini berarti tidak hanya dalam hal ketahanan dalam sumberdaya seperti pangan, air, energi, hasil-hasil pertanian dan hutan, tapi juga ketahanan secara ekologis, pendapatan dan kesehatan bagi keluarga. Dengan demikian, dalam pembangunan berkelanjutan terdapat interaksi positif antara faktor-faktor, komponen-komponen dan tingkatan yang berbeda dan bahwa terdapat keseimbangan dinamis antara apa yang diminta dari *agro-ecosphere*, dan apa yang diberikan kepadanya. Laki-laki dan perempuan memainkan peranan kunci dalam menciptakan keseimbangan tersebut.

Namun demikian, prasyarat bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan adalah bahwa manager (pengelola) sistem harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi lainnya, sebagaimana halnya terhadap arah pembangunan yang menurut mereka setara dan berkelanjutan. Kontrol artinya mempunyai hak dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang pembangunan mampu mengentaskan kemiskinan maka menurut Dankelman pembangunan tersebut berkelanjutan, demikian pula sebaliknya.

Permasalahannya, kebijakan pembangunan paradigma lama telah berdampak pada kerawanan ekologis di hampir semua belahan dunia, terlebih di negara-negara sedang berkembang. Kerawanan ekologis meningkatkan kondisi ketersediaan air yang fluktuatif dan erosi serta bentuk-bentuk degradasi lingkungan lainnya, yang secara langsung mempengaruhi anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, dewasa dan anak-anak. Beban kerja perempuan meningkat. Kerawanan ekologis tersebut memperkuat disfungsi sosial, kemiskinan dan ketidaksetaraan antar kelas, umur/generasi dan seks (gender). Di pihak lain juga telah memperkuat perbedaan dan meningkatkan ketidaksetaraan, bukan hanya antara negara-negara Selatan dan Utara, tapi juga antar masyarakat dalam suatu negara, dimana yang kaya bertambah kaya, sementara si miskin bertambah miskin karena kehilangan akses dan haknya terhadap sumberdaya produktif.

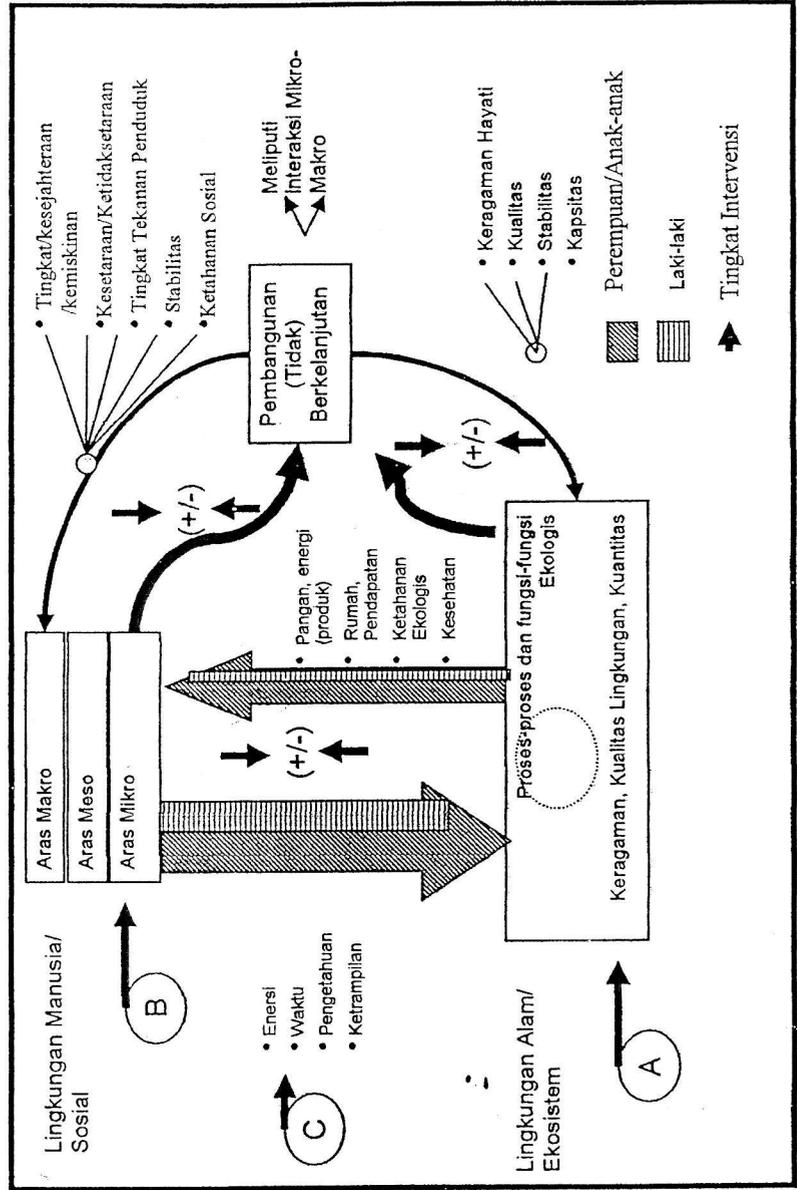
Merespon hal tersebut, Dankelman (2003) beranggapan bahwa untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan perlu suatu intervensi dengan pendekatan holistik baik

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

pada tingkatan kebijakan maupun aksi untuk memulihkannya dengan memperhatikan semua aspek pada *sociosphere* dan *ecosphere* baik secara masing-masing maupun pada area hasil interaksi keduanya. Dalam hal ini, Dankelman (2001) mengembangkan suatu model yang merupakan modifikasi model sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Selanjutnya Dankelman mengemukakan upaya-upaya intervensi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hubungannya dengan *ecosphere*, upaya intervensi yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan suplai sumberdaya alam melalui penghutan kembali, konservasi alam dan peningkatan input eksternal; (2) menstabilkan kembali sistem dan siklus ekologis melalui rehabilitasi lahan dan kontrol erosi, usahatani ramah lingkungan, polikultur, dan meningkatkan keragaman hayati; serta (3) meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberi perlakuan pada limbah dan sanitasi lingkungan dengan mengintroduksi proses dan produk yang mengurangi polutan. Sedangkan dalam konteks *sociosphere*, upaya intervensi yang dilakukan seharusnya mengurangi kendala dan mengatasi masalah antara lain dengan: (a) mengintroduksi alat dan teknologi yang lebih efisien dari segi waktu dan energi; (b) mengembangkan program-program pelatihan kejuruan dan sumberdaya alam; (c) meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumberdaya produktif; serta (d) memberi alternatif kegiatan produktif lainnya.

Perubahan-perubahan yang dipromosikan pada *ecosphere* harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran akan pengelolaan sumberdaya secara bijak dan pendidikan pengendalian penduduk (keluarga berencana). Adapun pembangunan itu sendiri dituntut merubah pendekatannya antara lain dengan cara desentralisasi, meningkatkan akses dan kontrol komunitas lokal dengan memberi hak pada mereka terhadap sumberdaya tersebut serta memberdayakan mereka atas dasar keadilan dan kesetaraan gender. Di Indonesia, dikeluarkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang pengarus-utamaan gender dalam pembangunan nasional merupakan salah satu upaya intervensi kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan setara gender.



Gambar 1. Memulihkan Pembangunan Berkelanjutan dan Kesetaraan Gender (Dankelman 2003)

BERAGAM PERSPEKTIF DALAM POROS GENDER, LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

Konvergensi minat terhadap isu gender, lingkungan dan pembangunan muncul dan merebak di bawah kondisi restrukturisasi ekonomi, ekologi, kebudayaan dan politik yang cepat dari tingkat global ke tingkat lokal. Perubahan-perubahan ekonomi, politik dan lingkungan global telah mempengaruhi laki-laki dan perempuan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pelaku (aktor) dalam penggunaan dan alokasi sumberdaya, pengelolaan lingkungan dan penciptaan norma-norma kesehatan lingkungan dan kesejahteraan.

Dalam hal ini terdapat beberapa ahli dan aktivis yang melihat tidak adanya perbedaan gender dalam cara-cara manusia berhubungan dengan lingkungan, kecuali bahwa mereka dipengaruhi oleh kendala-kendala yang dipaksakan oleh struktur ekonomi dan politik yang tidak adil. Permasalahannya, di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan gender dalam hubungannya dengan lingkungan sebenarnya tidak berakar dari perbedaan biologi, tapi oleh konstruksi sosial budaya tentang gender yang bervariasi karena perbedaan budaya, kelas, ras, dan tempat.

Banyak para ahli yang mencermati adanya perbedaan pandangan dalam melihat poros gender, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya dalam tulisan ini dikemukakan beragam aliran pemikiran atau perspektif yang berkembang dalam melihat hubungan ketiganya: gender, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa pihak mencoba membuat kategorisasi terhadap beragam perspektif yang berkembang seputar isu gender, lingkungan dan pembangunan. Braidotti dkk (1994) mengemukakan berbagai perspektif, seperti *developmentalisme*, *ecofeminisme*, *deep ecology*, sosiologi ekologi dan feminisme environmentalis. Rochelau dkk (1996) membedakannya ke dalam ekofeminisme, feminis environmentalisme, feminis sosialis, feminis poststrukturalis, environmentalisme dan feminisme politik ekologi. Adapun Dankelman (2003) membedakannya ke dalam tiga kategori, yakni pendekatan liberalisme deskriptif (*descriptive, liberal approach*), ekofeminisme (*ecofeminism*) dan environmentalisme (*environmentalism*).

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa perspektif dengan mencoba mensintesis berbagai pendapat para akademisi yang mencermati poros gender, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, secara umum dari perspektif feminis dengan mendeskripsikan secara singkat bagaimana setiap perspektif berusaha menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan-hubungan antara gender, lingkungan dan pembangunan serta menganalisis kontribusi dan kekurangan atau kelemahan yang ada pada setiap perspektif tersebut.

(1) Pendekatan Liberal Deskriptif

Pendekatan ini muncul bersamaan dengan publikasi Ester Boserup (1970) yang berjudul *Women's Role in Economic Development*, yang dianggap sebagai peneliti pionir yang meneliti hubungan antara perempuan dengan lingkungan yang lebih bersifat deskriptif dan menekankan aspek material. Dalam studinya di berbagai negara sedang berkembang yang berbeda dalam sistem pertanian mereka: *female farming*, *male farming* dan *mixed farming*; dijelaskan cara-cara bagaimana perempuan berinteraksi secara nyata dengan sumberdaya alam dan lingkungan fisik mereka, seperti air, energi, hutan dan lahan. Selain itu, studinya juga menelaah kecenderungan-kecenderungan perubahan lingkungan dan peranan perempuan dalam mempromosikan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil studi tersebut memperkuat citra perempuan sebagai pembawa air, pemberi energi dan produser pangan serta sebagai pengelola lingkungan. Pendekatan ini melihat pembagian kerja seksual - suatu produk dari evolusi secara historis sistem patriarki, sebagai suatu penentu (determinan) bagi poros perempuan - lingkungan - pembangunan.

Pendekatan ini memfokuskan perhatiannya kepada aspek-spek material atau ekonomi antara perempuan, lingkungan dan pembangunan. Pendekatan ini juga menekankan pada aspek manajerial dalam meminimalkan pengaruh-pengaruh negatif dari pembangunan terhadap perempuan, dan menargetkan perempuan sebagai penerima bantuan-bantuan (stimulan) pembangunan. Pendekatan ini memandang perempuan sebagai suatu sumberdaya yang paling bernilai untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Braidotti et al 1994). Cara berfikir seperti ini telah diikuti oleh banyak arus utama (*mainstream*) agen-agen pembangunan. Oleh karena minat-minat terhadap perempuan dan lingkungan pada suatu situasi tertentu dipandang menjadi identik, maka keterlibatan perempuan dalam proyek-proyek pembangunan dan lingkungan dianjurkan. Dalam kebijakan dan praktek-praktek pembangunan hal ini menghasilkan suatu pendekatan integratif, yang menekankan pada kebutuhan untuk menjadikan perempuan sebagai kelompok target untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kritik terhadap pendekatan ini, adalah adanya anggapan terlalu menekankan pada peranan instrumental dimana perempuan harus memainkan peranan dalam pembangunan berkelanjutan. Padahal kenyataannya, perempuan sudah memikul tugas lain yang memberi mereka beban kerja yang berat. Tavares dalam Dankelman (2003) mengingatkan bahwa perempuan seharusnya tidak hanya memperoleh kapasitas untuk mengatasi permasalahan lingkungan, tapi mereka harus didukung dalam proses mentransformasikan struktur kekuasaan yang menyembunyikan mereka dari menjadi partner yang setara dan sepenuhnya dalam proses pembangunan. Selanjutnya Tavares juga mengemukakan bahwa banyak kebijakan dan proyek pembangunan yang mungkin ditujukan untuk membantu perempuan dalam memenuhi kebutuhan mereka yang sifatnya segera, namun mereka lebih menitikberatkan kepada peranan domestik perempuan ketimbang peranan produktif

mereka, tidak mendorong laki-laki untuk mengambil bagian untuk bertanggung jawab dalam peranan domestik, dan tidak memberi perempuan wewenang untuk mengontrol sumberdaya lingkungan dan memutuskan sendiri tentang kehidupan mereka. Kritik lainnya adalah, pendekatan ini gagal dalam mempertanyakan asumsi epistemologi yang mendukung model pembangunan dominan, dan karenanya mengabaikan dimensi kritis dari lingkungan dan krisis sosial ekonomi (Braidotti et al 1994). Meskipun pendekatan ini berkontribusi nyata pada visibilitas peranan perempuan dalam pengelolaan lingkungan, namun, pendekatan ini mempunyai kelemahan karena lebih mengangkat citra perempuan sebagai korban pembangunan ketimbang aktor yang aktif dalam pembangunan. Untuk merespon terhadap kritikan tersebut, Davidson menyarankan bahwa proyek-proyek pembangunan seharusnya dilengkapi oleh kebijakan strategis untuk menjamin keterlibatan perempuan, dan harus menyumbang terhadap pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan lingkungan mampu memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender¹. Lebih lanjut, meskipun banyak publikasi menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk berbicara tentang perempuan sebagai suatu totalitas tanpa mengabaikan perbedaan ekonomi, budaya dan sosial diantara mereka, namun demikian perempuan banyak digambarkan sebagai kelompok homogen secara teoritis. Karenanya banyak akademisi selanjutnya mulai memperhatikan perbedaan di kalangan perempuan dari beragam ras, kelas, status dan umur.

(2) Ekofeminisme (*Ecofeminsm*)

Istilah ekofeminisme pertama kali diintroduksi oleh seorang feminis Perancis bernama Françoise d'Eaubonne (Braidotti et al 1994; Dankelman 2003). Pada waktu itu dia menyatakan dua ancaman yang mendesak terhadap kelangsungan hidup manusia, yaitu kelebihan penduduk dan pengrusakan terhadap sumberdaya yang disebutnya sebagai "sistem laki-laki" (*The Male System*). Dalam pandangannya satu-satunya cara untuk keluar dari masalah tersebut adalah dengan menghancurkan kekuasaan laki-laki oleh perempuan. Karenanya, planet dalam gender feminin akan menjadi hijau kembali untuk semuanya.

Ekofeminisme memandang adanya suatu hubungan erat antara perempuan dan alam yang dilandaskan pada penindasan oleh kelembagaan yang patriarki dan kebudayaan Barat yang dominan, sebagaimana halnya identifikasi positif oleh perempuan dengan alam. Selanjutnya konsep ekofeminisme mengacu pada suatu aliran gerakan feminis yang di dalamnya sarat dengan aspek teoritis yang berasumsi bahwa ada hubungan yang kritis antara dominasi alam dan perempuan. Ekofeminisme memfokuskan pada kesalingterhubungan antara feminis dan kepentingan yang bersifat ekologis. Munculnya ekofeminisme telah banyak mempengaruhi debat berkenaan perempuan, gender, dan pembangunan.

Tercatat banyak ahli yang tergolong penganut perspektif ini, diantaranya Carolyn Merchant, Maria Mies dan Vandana Shiva. Carolyn Merchant (1980) dalam karyanya yang sangat berpengaruh *The Death of Nature; Women, Ecology and the Scientific*

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Revolution, telah membangun kritik yang kuat terhadap konstruksi sains pada masa itu yang dianggapnya sangat bersifat reduksionis. Dia beranggapan bahwa perempuan lebih dekat pada sumberdaya alam ketimbang laki-laki, dan mereka memandang adanya suatu hubungan antara dominasi laki-laki terhadap sumberdaya alam dengan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Itu sebabnya dalam ekofeminisme ada dua dikotomi, yakni alam dan kebudayaan; serta perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, laki-laki dihubungkan dengan kebudayaan sementara perempuan dengan alam (Braidotti 1994; Jackson 1997).

Maria Mies (1988) yang disebut sebagai penganut Marxis, mengembangkan argumennya yang menyatakan bahwa peranan perempuan dalam melahirkan dan mengasuh anak sebagai bekerja, dan ini merupakan kontribusi penting perempuan. Bagi Mies, pemberian kebutuhan dasar bagi kelangsungan keluarga mencerminkan hubungan yang dekat antara perempuan dengan alam. Sehingga peran ganda tersebut, menjadikan pemahaman perempuan terhadap alam sebagai superior dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak hanya lebih dekat kepada alam, tapi perempuan itu juga "alam" karena mereka melahirkan dan mengasuh anak-anak mereka, yang dalam hal ini dieksploitasi ganda dalam masyarakat patriarki secara global.

Bersamaan dengan itu, Vandana Shiva dalam publikasinya berjudul *Staying Alive* (1989) menyatakan bahwa pembangunan didominasi oleh model pembangunan Barat, sistem patriarki dan dilandaskan pada suatu model sains dan teknologi yang reduksionis dalam menciptakan pasar global telah menghancurkan perempuan, alam dan orang-orang non-Barat (Braidotti 1994). Dia selanjutnya menyatakan bahwa nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan paternalistik, kolonial dan neokolonial telah memarginalkan perempuan dan pengetahuan keilmuan yang dimiliki perempuan dan alam. Oleh karena itu Shiva mengusulkan suatu model oposisi terhadap pembangunan model Barat yang destruktif, berorientasi pada kulit putih, laki-laki dan patriarki, yang disebutnya dengan model pembangunan yang berbasis pada sistem pertanian tradisional India yang berhasil menciptakan harmoni dengan alam.

Shiva dan Mies keduanya menganjurkan suatu model global dari pertanian subsisten. Menurut Braidotti, permasalahannya, model pertanian subsisten tidak akan cocok dengan kondisi negara-negara dimana populasinya sangat padat dengan lahan pertanian yang terbatas. Kontribusi utama dari ekofeminisme adalah sifatnya yang mempertanyakan secara fundamental model pembangunan dominan dan menekankan pada validitas dari pengetahuan orang-orang marjinal. Perspektif ini juga berkontribusi dengan menantang asumsi-asumsi epistemologi dalam sains, teknologi dan pembangunan serta mengulas pengaruh-pengaruh negatifnya terhadap orang-orang, alam dan kebudayaan lokal. Menurutnya, model budaya Barat membangun pasar dan akumulasi modal yang lebih menitikberatkan pada introduksi teknologi pertanian yang bersifat monokultur.

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Namun demikian, terdapat sejumlah kritik ditujukan kepada ekofeminisme, diantaranya bahwa perspektif ini berfokus terlalu banyak pada argumen ideologis dan gagal mengarahkan perbedaan ekonomi dan kekuasaan yang juga menyumbang terhadap diferensiasi antara perempuan. Selain itu juga gagal memperhitungkan struktur penindasan antara perempuan yang ada antar ras, kelas dan kasta pada banyak kebudayaan (Braidotti et al 1994). Ekofeminisme mengabaikan relasi gender dimana maskulinitas dan femininitas itu bersifat relasional, dikonstruksikan secara sosial dan budaya dan merupakan kategori yang bisa dinegosiasikan (Jackson 1997).

Sebagaimana dikemukakan oleh Dankelman (2003), menurut para pengkritiknya, ekofeminisme terlalu melebih-lebihkan gagasan harmoni, ekologis dan masyarakat tradisional dan meningkatkan dikotomi serta dualisme. Meskipun perspektif ini mengkritik dualisme yang ada dalam sains dan masyarakat Barat, namun dalam pemikirannya ekofeminisme juga memiliki karakter dualistis, karena senantiasa mempertentangkan laki-laki/perempuan, budaya/alam, konsumsi/produksi, lokal/global (King dan Agarwal *dalam* Dankelman 2003). Agarwal menyatakan bahwa ekofeminisme juga gagal menemukan adanya keragaman dalam hubungan antara perempuan dengan lingkungan dan dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Umum diketahui bahwa bagaimana relasi antar kelas dalam masyarakat menjadikan perbedaan akses dan kontrol antar kelas atau lapisan masyarakat terhadap alam (lahan).

Sebagaimana Shiva, Agarwal juga menimba pengalaman dari India. Akan tetapi, berbeda dengan Shiva, Agarwal melihat adanya kebutuhan untuk mengkontekstualisasikan fakta bahwa perempuan pedesaan yang miskin memang muncul sebagai aktor utama dalam gerakan lingkungan di India, oleh karena kemarjinalan mereka menuntut untuk mempertahankan hubungan yang bersifat resiprokal (timbang balik) dengan alam. Bagi Agarwal, hubungan/jalinan perempuan dan alam telah dikonstruksikan secara sosial dan budaya, bukan secara biologis. Karenanya, menurut Melissa Leach (1991) sebagaimana dikutip Dankelman dan Braidotti, ekofeminisme juga tidak mungkin berjalan dalam suatu proyek yang bersifat lintas-budaya, karena gagasan bahwa pemeliharaan sumberdaya alam sebaiknya dilakukan oleh perempuan berisiko dalam menjadikan perempuan sebagai agen utama yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan.

(3) Feminisme Environmentalisme

Pespektif ini dicetuskan oleh Bina Agarwal (1998) yang menekankan pada adanya pengaruh relasi gender dalam hubungan antara pengelolaan sumberdaya alam dan proses-proses ekologis yang dilandaskan pada perbedaan peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya hubungan antara perempuan dan lingkungan harus dilihat sebagai terstrukturkan oleh suatu gender dari kelas/kasta/ras organisasi produksi, reproduksi dan distribusi tertentu. Dia menyuarakan adanya pengaruh kelas dan gender terhadap perubahan lingkungan dan menggarisbawahi kebutuhan untuk

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

mentransformasikan pembagian kerja dan akses terhadap sumberdaya aktual. Pengaruh kelas dan gender terhadap perubahan lingkungan kesemuanya dimanifestasikan sebagai tekanan-tekanan terhadap waktu, pendapatan, gizi dan kesehatan perempuan, jaringan-jaringan sosial pendukung serta pengetahuan mereka. Dia menekankan bahwa aset seharusnya dikontekstualisasikan, dan bahwa hubungan perempuan, laki-laki dan alam itu dibangun secara sosial dan budaya.

Menurut Cecile Jackson (1997), diferensiasi gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dari rumah tangga yang sama berhubungan/berinteraksi dengan sumberdaya dengan cara-cara yang berbeda dan keragaman ini juga mewarnai relasi antar kelas dalam masyarakat. Hasilnya bisa saja tidak bisa diramalkan. Bisa saja perempuan miskin lebih atau malah tidak berusaha yang ramah lingkungan dalam perilaku mereka dibanding laki-laki miskin atau laki-laki dan perempuan yang kaya, karena semuanya sangat tergantung kepada hak-hak, tanggung jawab, pengetahuan dan posisi tawar menawar dalam rumahtangga dan masyarakat mereka. Strategi kehidupan bagi laki-laki dan perempuan dalam rumahtangga itu beragam dan merefleksikan relasi gender. Demikian pula halnya perempuan dalam kelas yang sama bisa berbeda peranan karena perbedaan umur dan siklus hidup dalam hubungannya dengan lingkungan. Sebagai contoh, tugas mengambil air dan kayu bakar, meskipun dapat dikatakan sebagai pekerjaan perempuan, namun banyak penelitian yang menemukan bahwa perempuan pada kelas tertentu bisa mendelegasikan tugas tersebut kepada anak laki-laki mereka atau bahkan mengupahkannya kepada laki-laki dewasa.

Sebagaimana dikutip Dankelman, menurut Davids dan Van Driel (2002), pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai suatu manifestasi dari feminisme post-struktural yang menekankan pada perbedaan dan relasi-relasi yang bersifat spesifik-lokal antar gender.

Menurut Dankelman perspektif ini serupa dengan konsep yang diperkenalkan Dianne Roscheleau (1995) yang disebut ekologi politik feminis (*feminist political ecology*), yang melihat hubungan antara manusia, alam dan lingkungan sebagai suatu hasil relasi-relasi material yang distrukturkan oleh relasi gender dan kekuasaan; yang selanjutnya diekspresikan ke dalam dinamika dan kumpulan pengetahuan, sains dan teknologi yang tergenderkan. Leach (1991) juga menggarisbawahi bahwa hubungan antara perempuan dan alam itu terdiferensiasi; dia memandang bahwa relasi gender itu berinteraksi dengan tanggung jawab, hak dan aktivitas sehingga memungkinkan kita mengidentifikasi perbedaan antar kelompok dan dalam kelompok perempuan sebagaimana halnya pada laki-laki.

Konsekuensi penting dari pendekatan ini adalah bahwa dalam proses pemulihan lingkungan seharusnya diidentifikasi tugas-tugas laki-laki dan perempuan di dalamnya, dan harus menghindari pandangan yang terlalu instrumental terhadap peranan perempuan dalam pengelolaan lingkungan - wanita sebagai penyedia pencari/pembawa air, penyedia pangan, manager lingkungan dan lainnya -

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

sebagaimana kritik yang dikemukakan terhadap pendekatan liberal yang dikemukakan Tavares (2002).

Implikasi dari pendekatan ini, untuk pengembangan kebijakan adalah bahwa proyek-proyek pembangunan sebaiknya menggunakan pendekatan perencanaan secara partisipatif dalam upaya untuk memperoleh perbedaan peranan, kebutuhan dan perspektif dari beragam kelompok (termasuk perempuan dan laki-laki) secara lebih utuh dan nyata. Itu sebabnya pengarusutamaan gender menjadi penting dalam transformasi masyarakat yang berbasis komunitas dan partisipatif serta ramah lingkungan. Agarwal menyarankan adanya dua strategi penting di dalamnya, yaitu mentransformasi relasi gender dan pembagian kerja sebagaimana mentransformasi hubungan-hubungan antara orang (manusia) dengan alam. Pada saat yang bersamaan, proses tersebut harus dikontekstualisasikan dengan situasi material dari perempuan dalam membangun konstruksi ideologi gender.

(4) Feminisme Sosialis

Feminis sosialis menekankan perhatiannya kepada inkorporasi gender ke dalam politik ekonomi dan menggunakan konsep-konsep produksi dan reproduksi untuk merinci peranan-peranan perempuan dan laki-laki dalam sistem ekonomi. Para penganut perspektif ini mengidentifikasi perempuan dan lingkungan dengan peranan-peranan reproduktif dalam pembangunan ekonomi yang tidak adil, dan sebagaimana halnya ekofeminis, memandang bahwa perempuan sangat dekat dengan alam dan karenanya sebagai pemelihara alam.

(5) Feminisme Post-strukturalis (*Feminist Poststructuralist*)

Para penganut perspektif ini menjelaskan pengalaman gender dan lingkungan sebagai suatu manifestasi dari pengetahuan yang terbentuk oleh banyak dimensi dari identitas dan perbedaan, seperti gender, ras, kelas, etnis, dan umur. Perspektif ini berkembang atas kritik feminis terhadap sains dan konsep serta praktek pembangunan di negara-negara sedang berkembang.

(6) Environmentalisme

Menurut Cecile Jackson, pengertian environmentalisme mengandung dua makna. *Pertama* adalah determinisme yang bersifat lingkungan atau lingkungan sebagai penentu, yang banyak dianut oleh banyak ahli antropologi. *Kedua* adalah makna yang berpusat pada ideologi dan praktek-praktek yang menginformasikan dan berkenaan dengan kepentingan terhadap lingkungan. Selanjutnya Cecile Jackson membedakan pemikiran-pemikiran dan praktek-praktek environmentalisme ke dalam tiga kategori: teknosentris, ekosentris dan non-Western.

Pendekatan teknosentris terhadap alam merupakan paradigma yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pembangunan masa lalu yang lebih berorientasi pada

kepentingan laki-laki; tercermin dari sikapnya yang bersifat eksploitatif terhadap alam, dan menggunakan mitos metode keilmuan yang sangat berpengaruh, meningkatkan dominasi dan kontrol atas perempuan. Hal ini berhubungan dengan dikotomi pandangan bahwa teknologi - sebagai bagian dari budaya - merupakan domain laki-laki; dan perempuan bagian dari alam.

Pendekatan ini tidak memberi ruang bagi kepentingan politik gender, karena bagi perspektif ini masalah-masalah lingkungan bisa diatasi oleh intervensi dan stimulan yang bersifat ekonomis dan teknologi. Gagasan bahwa sains itu objektif dan bebas nilai telah menutupi diferensiasi dan bias gender dalam mengakui dan memprioritaskan masalah-masalah lingkungan, akses terhadap kekuasaan politik dan birokrasi serta sumberdaya, informasi dan pengetahuan tentang lingkungan, serta dalam menilai bentuk-bentuk kerja yang berbeda.

Environmentalisme ekosentris dapat ditelusuri melalui romantisme Eropa pada abad 16-18. Perspektif environmentalisme ekosentris dilandasi oleh pemikiran untuk memprioritaskan alam - bukan manusia - dalam pembangunan. Karenanya menurut perspektif ini, pengurangan jumlah penduduk sangat penting, karena penambahan penduduk dilihat sebagai faktor yang akan menyebabkan degradasi lingkungan dan karenanya tidak mendukung terhadap perbaikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh serta berdampak negatif terhadap komunitas non-manusia. Hal ini tercermin dari diberlakukannya program keluarga berencana di negara-negara Selatan (sedang berkembang) serta membatasi migrasi dari Selatan ke Utara. Perspektif ini memiliki kelemahan yang sangat esensial dalam hubungan antara perempuan dan lingkungan. Perempuan dipandang sebagai kategori yang homogen.

Menurut Jackson, environmentalisme non-Western muncul setelah adanya analisis environmentalisme India oleh Ramachandra Guha (1989). Sebagai suatu keseluruhan, environmentalisme India berbeda dengan yang ada di Utara, karena merefleksikan adanya kompetisi terhadap sumberdaya produktif ketimbang isu-isu kualitas hidup dan waktu luang. Selain itu, India bukanlah negara dengan masyarakat post-industri; dan aksi-aksi di India secara esensial mencerminkan gerakan petani India, karena penderitaan kehidupan telah berdampak pada degradasi sumberdaya di India. Guha membedakan adanya tiga kategori environmentalisme, yaitu: Gerakan Gandhi, Gerakan Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology Movement*) dan Marxis Ekologis. Menurut Jackson, ketiganya dalam beberapa hal berhubungan dengan bentuk-bentuk environmentalisme di Barat. Gerakan Gandhi memperlihatkan unsur-unsur yang sarat dengan moral, menolak materialisme, menganjurkan dikembangkannya harmoni sebagaimana sebelum masa kolonial dan menghormati relevansi agama dengan lingkungan yang paralel dengan ekosentrisme. Di pihak lain, Marxis Ekologis, sangat menentang tradisi tapi positif dalam sikapnya terhadap sains dan industrialisasi serta menekankan ketidaksetaraan dalam analisis mereka terhadap sebab dan akibat degradasi lingkungan.

(7) Feminisme Politik Ekologi

Perspektif ini dikembangkan oleh Dianne Rosheleau, Barbara Thomas-Slayer dan Esther Wangari yang memperlakukan gender sebagai suatu variabel kritis yang mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumberdaya; yang berinteraksi dengan kelas, kasta, ras, budaya dan etnik akan mempengaruhi perubahan ekologis, perjuangan laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan kehidupan yang baik secara ekologis serta mempengaruhi prospek setiap komunitas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Perspektif ini berusaha memahami dan menginterpretasikan pengalaman lokal kedalam konteks proses-proses perubahan ekonomi dan lingkungan global. Menurut mereka terdapat tiga aspek penting. *Pertama*, pengetahuan yang digenderkan (*gendered knowledge*) sebagaimana terefleksikan dalam suatu kemunculan “sains untuk bertahan hidup” (*science of survival*) yang meliputi penciptaan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan rumah, kerja dan ekosistem regional yang sehat. *Kedua*, mempertimbangkan hak-hak dan tanggung jawab lingkungan yang digenderkan, termasuk di dalamnya harta/properti, sumberdaya, ruang dan semua keragaman dari hukum dan hak-hak adat yang semuanya digenderkan. Adapun yang *ketiga*, adalah tema politik lingkungan dan aktivisme akar rumput yang digenderkan. Melonjaknya keterlibatan perempuan dalam perjuangan secara kolektif terhadap isu-isu sumberdaya dan lingkungan memberi kontribusi terhadap pendefinisian kembali identitas mereka, makna gender dan sifat dari masalah-masalah lingkungan.

Feminisme politik ekologi merangkum kedalamnya suatu kerangka tunggal dari perspektif feminis yang dikombinasikan dengan analisis relasi-relasi ekologi, ekonomi dan kekuasaan politik. Perspektif ekologi feminis membangun suatu analisis berkenaan dengan makna-makna identitas, perbedaan dan pluralitas dalam hubungannya dengan kebergandaan perubahan dan lingkungan.

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan di atas, beragamnya aliran feminisme dalam wacana poros gender, lingkungan dan pembangunan menggambarkan adanya perbedaan pandangan diantara mereka mengenai hubungan ketiga aspek tersebut (gender, lingkungan dan pembangunan). Namun demikian, deskripsi di atas tampaknya dapat dilengkapi oleh pendapat Caroline Merchant yang membandingkan empat aliran feminisme dan lingkungan: Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Kultural dan Feminisme Sosial (Doyle dan McEachern 2001). Perbandingan ini dapat dilihat lebih jauh dalam artikel “Ekofeminisme: Pendekatan dan Relevansinya” yang ditulis oleh Melani Abdulkadir-Sunito dan Ekawati Sri Wahyuni.

Dimensi gender pada aras mikro (rumah tangga), meso (komunitas) dan makro (nasional, regional, global) saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi proses-proses serta fungsi-fungsi ekologis, baik dari segi keragaman serta kualitas dan

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

kuantitas lingkungan, yang pada gilirannya menentukan berhasil tidaknya pembangunan berkelanjutan yang berlangsung di masing-masing negara. Sehubungan dengan itu, bagi para pemerhati gender, pengetahuan atas berbagai perspektif yang menjelaskan hubungan poros gender, lingkungan dan pembangunan menjadi penting, setidaknya untuk memahami asumsi-asumsi, proses dan kontribusi masing-masing perspektif serta kelemahan dalam memaknai hubungan gender, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat sampai pada pilihan yang secara sadar dilakukan untuk lebih mencermati fenomena gender, lingkungan dan pembangunan - pada aras mikro, meso, makro dan interaksi ketiganya - di Indonesia, melalui penelitian-penelitian yang diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan perspektif baru dalam poros gender, lingkungan dan pembangunan, yang pada gilirannya diharapkan dapat berkontribusi bagi terumuskannya kebijakan-kebijakan yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, termasuk pembangunan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. (1994) *A Field of One's Own : Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
- Boserup, E. (1970) *Woman's Role in Economic Development*. Allen & Unwin. London.
- Braidotti, R., E. Charkiewisz, S. Hausler and S. Wieringa (1994) *Women, the Environment and Sustainable Development. Towards a Theoretical Synthesis*. Zed Books in Association with INSTRAW. Biddist Ltd, Guildford and King's Lynn. United Kingdom.
- Conway, Gordon (1998) *The Doubly Green Revolution. Food for All in the 21st Century*. Comstock Publishing Associates a division of Cornell University Press. Ithaca, New York.
- Dankelman, Irene (1993) Women, Children and Environment. Implications for Sustainable Development. In Steady F.C. (Ed.). *Women and Children First, Environment, Poverty, and Sustainable Development*. Schenksman Books. Rochester, Vermont.
- _____ (2003) *Gender, Environment and Sustainable Development: Theoretical Trends, Emerging Issues and Challenges*. Review Paper prepared for INSTRAW.
- Diamond, N. et al (1998) *Gender in Coastal Resource Management. Case Study in North Sulawesi*. Coordinating Project by Rhode Island University and Center for Coastal Resource Management of Bogor Agricultural University.
- Doyle, Timothy dan Doug McEachern (2001) *Environment and Politics*. Routledge Introductions to Environment Series. Second Edition. London and New York: Routledge.
- Ellis, F. (2000) *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. New York.
- International Labour Office (2000) *ABC of Women Workers' Rights and Gender Equality*. ILO. Geneva.

Gender, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

- Jackson, Cecile (1997) "Gender Analysis and Environmentalism" In Redclift M. and Benton, T (Eds.). *Sosial Theory and the Global Environment. Global Environmental Change Programme*. Routledge. London.
- Moser, C. (1986) *Gender Planning in the Third World. Meeting Practical and Strategical Gender Needs in World Development*. Pergamon Press.Vol.17.
- Quisumbing, A.R; and K.Otsuka; with S.Suyanto; J.B. Aidoo; and E. Payongayong. *Land, Trees and Women. Evolution of Land Tenure Institutions in Western Ghana and Sumatra*. Research Report 121. International Food Policy Research Institute, Washington,D.C.
- Reintjes, C., B. Haverkort, dan A. Waters-Bayer (1992) *Farming for the Future. An Introduction to Low-External-Input and Sustainable Agriculture*. McMillan. ILEIA, Netherlands.
- Rocheleau, D., B. Thomas-slayter, and E. Wangari (1996) *Feminist Political Ecology*. Global issues and local experience. Routledge. London.
- Sajogyo, P., S. Siwi, S.M. Machfud, E. Sri Wahyuni (1990) *Study on The Relation of Women's Integration in Rural Development and Their Reproductive Behavior*. Coordinating Project by FAO Rome CRFCD-CDS Research Institute Bogor Agricultural University.
- Thomas-Slayter, Barbara P. and Dianne E. Rocheleau (2001) Research Fronties at the Nexus of Gender, Environment, and Development: Linking Household, Community, and Ecosystem. *Human Ecology – An Interdisciplinary Journal* Volume 29 No. 2, Kluwer Academic/Plenum Publishers, <http://www.wknap.nl/journalhome.htm/0300-7839>

¹ Pemenuhan kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan terhadap kebutuhan yang segera dapat meringankan beban kehidupan perempuan, namun tidak menyinggung masalah ketimpangan yang ada antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat pembagian kerja seksual yang mengakar dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan strategis gender berupaya menghilangkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di dalam dan di luar rumahtangga serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, seperti undang-undang persamaan hak, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama (Moser 1986).